

MAMPU

KABAR DWI BULANAN PROGRAM MAMPU

KITA

KABAR DARI KITA

EDISI 4 / 2018 | JUL - AGT

Dialog Regional MAMPU Dukung Kepemimpinan Perempuan Capai SDGs



Program MAMPU mengadakan Dialog Regional bertema “*Leave No She Behind*” di Jakarta, 8-9 Agustus 2018 lalu dalam rangka mendukung kepemimpinan perempuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang responsif gender, inklusif, dan transformatif. Acara ini merupakan kelanjutan dari serangkaian konsultasi daerah yang telah dilaksanakan di 22 kabupaten/kota dan 10 provinsi selama Mei - Agustus 2018.

“Perempuan harus bergerak, bersuara, dan menjadi agen perubahan. Bukan objek, melainkan sebagai subjek,” tegas Dina Lumbantobing, Koordinator Pelaksana Konsorsium PERMAMPU (Perempuan Sumatera MAMPU), di awal acara (gambar bawah kanan).

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Woro Srihastuti Sulistyaningrum (gambar di atas), mengungkapkan bahwa Dialog Regional merupakan ruang berbagi pengalaman dan pembelajaran dari berbagai inisiatif yang

mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, yang berhasil dilaksanakan di Indonesia dan negara-negara tetangga.

Pembicara dari Filipina, Malaysia, Australia dan Indonesia berbicara tentang meningkatkan keterlibatan dan kepemimpinan perempuan melalui media sosial, pemberdayaan ekonomi, penguatan jaringan dan aksi kolektif, serta peran pemerintah dalam menghadapi ketidaksetaraan gender. Para Mitra MAMPU dan pejabat pemerintah daerah melanjutkan diskusi lebih dalam mengenai isu-isu tersebut di hari kedua.

Kirsten Bishop, Konselor bidang Kemiskinan dan Pembangunan Sosial Kedutaan Besar Australia, mengungkapkan apresiasi bahwa acara ini dapat memperdalam aksi kolektif yang strategis dan efektif untuk mendukung pencapaian SDGs.

“Selanjutnya akan diadakan Pertemuan Nasional yang mengembangkan strategi untuk berbagi dan menerapkan pembelajaran dari MAMPU kepada audiens yang lebih luas, sehingga MAMPU dapat menunjukkan bahwa perempuan adalah aktor perubahan dalam mengatasi ketimpangan gender,” pungkas Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia.



“Perempuan harus bergerak, bersuara, dan menjadi agen perubahan. Bukan objek, melainkan sebagai subjek,”

Dina Lumbantobing

Bappenas Paparkan Reses Partisipatif sebagai Praktik Baik dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender kepada Pemerintah Afghanistan

Pada 14 Agustus 2018, Pemerintah Afghanistan melakukan kunjungan belajar ke Kementerian PPN/Bappenas. Melalui pertemuan ini, Pemerintah Afghanistan memahami PPRG lebih dalam melalui praktik baik yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Termasuk salah satunya adalah Reses Partisipatif yang dikembangkan oleh mitra MAMPU, BaKTI.

Dalam paparannya, Amalia Adininggar Widayanti, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan didampingi oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga memperlihatkan latar belakang & konteks Indonesia sehingga muncul PPRG, situasi terkini isu perempuan, langkah yang diambil dalam pengarusutamaan gender beserta tantangan dan solusi yang diambil Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan PPRG. Reses Partisipatif, model yang dikembangkan BaKTI, mitra MAMPU menjadi salah satu contoh praktik baik yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan PPRG di tingkat daerah.

Reses Partisipatif bertujuan untuk meningkatkan suara dan pengaruh perempuan dengan menghubungkan anggota parlemen dengan kelompok konstituen mereka melalui forum publik yang melibatkan perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Reses ini telah diuji coba di 8 kabupaten, melibatkan 26 anggota parlemen perempuan dan laki-laki sejak tahun 2015-2017. Diantaranya dua anggota DPRD Kota Parepare dan dua anggota DPRD Kab. Maros.



Hasil diskusi Reses Partisipatif dirangkum dalam sebuah dokumen yang menjadi referensi para anggota parlemen, pemerintah dan konstituen dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran wilayah. Beberapa hasil baik dari Reses Partisipatif adalah DPRD menginisiasi PERDA No.12/2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Parepare dan PERDA No.15/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Maros. Keduanya menjamin peningkatan usaha untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak di Parepare dan Maros.

BaKTI Raih Penghargaan Pemerintah Kabupaten Maros untuk Dampingan Program MAMPU

Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2018, Yayasan BaKTI menerima Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, Sulawesi Selatan atas dukungan dan pendampingan Program MAMPU dalam mendukung dan mendampingi pemerintah dalam pembuatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sejak tahun 2014-2018. Penghargaan diberikan langsung oleh Bupati Maros, Hatta Rahman yang diterima Lusya Palulungan, Program Manager MAMPU-BaKTI mewakili Yayasan BaKTI.



Program MAMPU-BaKTI mendampingi Pemkab. Maros dalam pembuatan beberapa kebijakan, antara lain Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak dan saat ini (2018) dalam proses pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender.

Dukungan lainnya termasuk menyediakan tenaga ahli dan mendampingi proses pembentukan Perda yang dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, mendorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros menggunakan Reses Partisipatif untuk memperoleh masukan dan aspirasi masyarakat yang memperkaya penyusunan Perda sekaligus membantu tugas pokok anggota DPRD. Penguatan juga diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maros dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Kekerasan dan penguatan staf Dinas DP3A dan P2TP2A terkait penanganan kasus kekerasan.

Konsultasi Nasional: Pelaksanaan Sistem Penanganan Terpadu untuk Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Pada 9-10 Agustus 2018, Komnas Perempuan melaksanakan Konsultasi Nasional Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) di Jakarta. Berbagai pihak hadir antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepolisian Daerah, Pengadilan Negeri dan LSM. Mereka datang dari Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Maluku.

Pertemuan ini memberikan gambaran situasi, tantangan dan pembelajaran dalam menyediakan layanan dan biaya visum korban kekerasan, keterkaitan antara pelayanan medis korban kekerasan dengan JKN/ BPJS serta kebutuhan terkait penanganan korban kekerasan oleh Aparatur Penegak Hukum.

Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Meluncurkan Gerakan Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender



Semangat “Tak Seorang pun Ditinggalkan” (*Leave No One Behind*), pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) turut mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Semangat itu terwujud di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam Peluncuran Gerakan Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif, dan Transformatif oleh Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise, Rabu, 25 Juli 2018 (gambar).

Berangkat dari keberhasilan serangkaian konsultasi daerah di NTB, digerakkan oleh KAPAL Perempuan, acara ini meneguhkan komitmen terhadap kerja sama yang saat ini berlangsung dalam mencapai SDGs melalui Deklarasi Multipihak. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, Bappeda NTB, akademisi, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Perempuan akar rumput Mitra MAMPU pun menyampaikan langsung pertanyaan dan menyuarakan pentingnya meningkatkan akses terhadap layanan, perlindungan sosial, serta penghapusan perkawinan anak kepada Menteri Yembise lewat dialog terbuka.

Program MAMPU mendukung kepemimpinan perempuan di Provinsi NTB bersama mitranya: Institut KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Aisyiyah, Migrant CARE, dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), beserta sejumlah submitra, termasuk LPSDM.



Program MAMPU adakan Sesi Berbagi Pengetahuan tentang Disabilitas

Pada Juli 2018, sesi berbagi pengetahuan bulanan Program MAMPU, Brown Bag Lunch, mengangkat topik “Memahami Disabilitas”. Peserta memperoleh pemahaman dasar tentang hukum disabilitas dan perempuan dan disabilitas terkait dengan area tematik MAMPU. Diskusi ini dibawakan oleh Chandra Sugarda (Gender, Disability, and Social Inclusion Specialist), dilanjutkan dengan sesi orientasi, mobilitas, dan sensitisasi oleh Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN). MAMPU mendukung disabilitas sebagai isu lintas sektoral yang mencakup perbaikan data penyandang disabilitas, peraturan, alokasi anggaran dan akses layanan di lima area tematik Program MAMPU dalam perlindungan sosial, pekerjaan, pekerja migran, akses ke jaminan kesehatan nasional serta layanan untuk perempuan korban kekerasan.

Kunjungan Anggota Parlemen Australia ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan



Pada 3 Agustus 2018, Delegasi Parlemen Australia didampingi Konsulat Jenderal Australia di Makassar berkunjung ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan hubungan kemitraan Australia dan Indonesia terutama terkait

dengan tatakelola pemerintahan yang demokratis, promosi toleransi antar umat beragama, masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta pengembangan ekonomi regional.

Kunjungan ke Maros diawali dengan pertemuan di Kantor Bupati dimana rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Maros, HA Harmil Mattotorang beserta beberapa pejabat lainnya. Ibu Sharon Claydon, anggota parlemen yang mewakili New South Wales sangat terkesan dengan pencapaian Kabupaten Maros yang telah berhasil menjadi salah satu Kabupaten Layak Anak di Indonesia.

Pada kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), rombongan disambut oleh Ketua DPRD Maros Chaidir Syam. Dalam sambutannya, Bapak Chaidir menyatakan, “Perda Kabupaten Layak Anak, Perda Pengarusutamaan Gender dan Perda Pendidikan Anak Usia Dini merupakan beberapa keberhasilan DPRD dan Pemda Maros yang ikut didukung Mitra Program MAMPU, Yayasan BaKTI.” Selain capaian ini, DPRD Maros, juga menjelaskan tentang perkembangan Reses Partisipatif yang juga merupakan pendampingan Program MAMPU dan Yayasan BaKTI yang telah memungkinkan anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat secara lebih optimal.

Kolaborasi Mitra MAMPU dan Pemda Bengkulu Hasilkan Pergub Pencegahan Perkawinan Anak

Provinsi Bengkulu telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak pada Juli 2018.

Sejak 2016, tiga mitra MAMPU yaitu Cahaya Perempuan WCC, KPI Bengkulu dan PUPA Bengkulu bersama dengan PKBI Bengkulu, serta Pemda Bengkulu (DP3A PPKB Provinsi) beradvokasi bersama untuk pencegahan perkawinan anak. Isu ini dilihat sebagai isu strategis yang berkaitan erat dengan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSRR) perempuan yang berkontribusi terhadap Angka Kematian Ibu (AKI), stunting, angka kekerasan seksual dan KDRT.

Koalisi membawa isu tersebut ke tingkat provinsi dan saling berbagi peran dalam advokasi, komunikasi dan publikasi serta membangun strategi berjejaring dan bermitra.

Mitra menggunakan data perkawinan anak dari pemerintah, serta data dan bukti yang mereka kumpulkan melalui pengalaman pendampingan kelompok perempuan sebagai basis penyusunan kebijakan, seperti data kasus kehamilan tak diinginkan sebagai penyebab perkawinan anak. Mitra MAMPU memfasilitasi forum multipihak yang mempertemukan pemerintah, OMS, dan kelompok dampingannya, mendorong proses advokasi melalui media dan sosialisasi ke publik.

Mitra MAMPU akan terus mengawal implementasi Pergub tersebut untuk memastikan bahwa peraturan tersebut berkontribusi terhadap pengurangan hambatan sosial, budaya dan institusional yang membatasi perempuan dalam melindungi dan memenuhi hak kesehatan reproduksi dan seksual.

“Dukungan MAMPU kepada Cahaya Perempuan WCC sebagai anggota Konsorsium PERMAMPU telah membantu penajaman analisis persoalan dan memperkuat pengorganisasian perempuan akar rumput di pedesaan dan daerah miskin kota.

“Penelitian yang didukung MAMPU semakin memperkuat advokasi kami yang berbasis data”

Tety Sumeri

Penelitian yang didukung MAMPU semakin memperkuat advokasi kami yang berbasis data,” ujar Tety Sumeri, Direktur Cahaya Perempuan WCC. Sebelumnya, Program MAMPU telah mendukung Konsorsium PERMAMPU melalui penelitian ‘Kehamilan yang Tidak Diinginkan’ dan penelitian tentang gizi perempuan dan perempuan muda.

Mitra MAMPU terus mengadvokasi dan mengawal tanggung jawab Pemerintah Daerah Bengkulu dalam melaksanakan sosialisasi dan implementasi Pergub tersebut secara efektif, serta menyusun RAD Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang didukung anggaran daerah RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2019.

20 Mahasiswa University of Sydney Mengunjungi MAMPU



Tanggal 9-20 Juli 2018 lalu, 20 mahasiswa University of Sydney berkunjung ke Program MAMPU di Indonesia. Dipandu oleh Sydney South East Asia Center (SSEAC), mahasiswa belajar mengenai isu dan gerakan perempuan di Indonesia. Beragam topik mereka pelajari, seperti isu kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan perempuan dan kebijakan perempuan, perempuan dan pengorganisasian komunitas serta perempuan dan agama. Mereka mengunjungi mitra-mitra MAMPU di Jakarta dan Sulawesi Selatan, yaitu Komnas Perempuan, LBH Apik, KAPAL Perempuan, BaKTI, 'Aisyiyah dan YKPM.

Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Informasi Lebih Lanjut:
Website: www.mampu.or.id
Twitter: @ProgramMAMPU
Email: info@mampu.or.id

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan